



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 2115/DJU/TI.1/XI/2024 Jakarta, 4 November 2024
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi
dan yang belum mencapai standar nilai EIS
Periode November Tahun 2024

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap pelaksanaan Implementasi SIPP di seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri pada bulan Oktober tahun 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 478/DJU/TI.1.1/III/2024 Hal Revisi penilaian pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri, dengan ini diumumkan Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus, Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP tertinggi pada 5 (lima) Pengadilan Negeri Klas IA, Pengadilan Negeri Klas IB dan II dengan penilaian tertinggi berdasarkan jumlah beban perkara. Selain itu juga disampaikan daftar pengadilan yang belum mencapai standar minimal nilai Evaluasi Implementasi SIPP untuk menerapkan register elektronik. Kategori penilaian sebagai berikut :

I. PENGADILAN TINGGI :

1. Kinerja

- Rasio penanganan perkara banding
- Jangka waktu penyelesaian perkara banding
- Jangka waktu pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju
- Rasio pendaftaran perkara banding secara elektronik

2. Kepatuhan

- Pelaksanaan verifikasi berkas perkara - Input penetapan hari sidang
- Pendaftaran perkara banding - Input pertimbangan hukum
- Penetapan Majelis Hakim - Input putusan
- Penunjukan Panitera Pengganti - Penetapan hari sidang
- Input penetapan Majelis Hakim / Hakim
- Input penunjukan Panitera Pengganti
- Verifikasi salinan putusan pada perkara banding elektronik (eCourt)
- Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

3. Kelengkapan

- Dokumen elektronik putusan
- Prosentase Upload ke Direktori Putusan

II. PENGADILAN NEGERI :

1. Kinerja

- Penyelesaian perkara tepat waktu
- Rilis versi SIPP
- Kesesuaian kode satker nomor perkara
- Jangka waktu pelaksanaan delegasi masuk

2. Kepatuhan

- Pendaftaran perkara
- Pencatatan barang bukti
- Penetapan Hakim
- Penetapan Panitera Pengganti
- Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti
- Penetapan hari sidang pertama
- Penginputan tuntutan
- Pengiriman berkas kasasi
- Pemberitahuan putusan / penetapan
- Penginputan penetapan Majelis/Hakim
- Penginputan penetapan hari sidang
- Penginputan penetapan Jurusita/JSP
- Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi
- Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang
- Kepatuhan Penundaan Perpanjangan Penahanan
- Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Perdata
- Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Pidana
- Penginputan putusan akhir
- Penginputan minutasi
- Pelaksanaan minutasi
- Penginputan permohonan banding
- Penginputan permohonan kasasi
- Penginputan permohonan PK
- Pengiriman berkas banding
- Pengiriman berkas PK
- Unggah Putusan Akhir
- Penginputan penetapan PP

4. Kelengkapan

- E-Document dakwaan/petitum
- Pencatatan saksi
- E-Document tuntutan
- E-Document putusan akhir/penetapan
- Dokumen elektronik berita acara sidang
- Dokumen elektronik relaas panggilan sidang pertama
- Dokumen elektronik rencana persidangan (*Court Callendar*)
- Dokumen elektronik putusan anonimisasi
- Data lapor mediasi
- Data diversi
- Data nilai sengketa

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

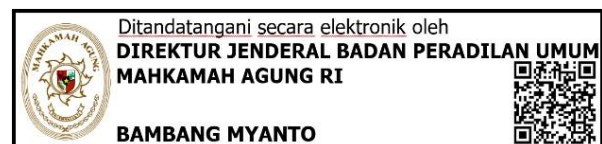
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

5. Kesesuaian

- Agenda sidang terakhir
- Tanggal putusan dan tanggal sidang terakhir
- Publikasi pihak
- Pengisian BHT
- Penahanan
- Sisa biaya perkara tingkat pertama
- Pelaksanaan sinkronisasi SIPP WEB
- Verifikasi dokumen elektronik elitigasi
- Pelaksanaan sinkronisasi SIPP ke Data Center MARI
- Pengarsipan Perkara

Apresiasi / penghargaan kami sampaikan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah melakukan banyak perbaikan dalam mengimplementasikan SIPP, namun bagi Pengadilan-pengadilan Negeri yang belum mencapai penilaian implementasi SIPP sesuai standar karena hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan agar dapat mendorong perbaikan kinerjanya.



Tembusan:

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM Ketua Kamar Pengawasan;
3. Yth Ketua Kamar Pembinaan;

EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PADA PENGADILAN TINGGI PERIODE OKTOBER 2024

I. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan perkara 1 s/d 300

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	1~300	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	348,01	550,00	100,00	998,01
2	1~300	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	347,75	550,00	100,00	997,75
3	1~300	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	344,69	550,00	100,00	994,69

II. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan perkara 301 s/d 1000

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	301~1000	Pengadilan Tinggi Jambi	348,90	550,00	100,00	998,90
2	301~1000	Pengadilan Tinggi Manado	344,05	550,00	100,00	994,05
3	301~1000	Pengadilan Tinggi Denpasar	344,76	547,86	100,00	992,62

III. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan perkara diatas 1000

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	> 1001	Pengadilan Tinggi Semarang	347,11	549,34	99,72	996,17
2	> 1001	Pengadilan Tinggi Jakarta	346,11	549,37	99,29	994,77
3	> 1001	Pengadilan Tinggi Surabaya	344,73	550,00	100,00	994,73

EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PADA PENGADILAN NEGERI PERIODE BULAN OKTOBER 2024

I. Persentase Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	1001~2000	Pengadilan Negeri Surakarta	95,93%	99,30%	98,45%	98,06%	97.94%(969.48)
2	>2000	Pengadilan Negeri Sidoarjo	95,04%	98,72%	97,25%	99,51%	97.63%(977.11)
3	>2000	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	92,59%	95,64%	98,67%	98,29%	96.30%(952.31)
4	>2000	Pengadilan Negeri Palembang	95,56%	96,80%	99,42%	92,69%	96.12%(959.43)
5	>2000	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	92,14%	97,66%	96,10%	96,91%	95.70%(964.17)
6	>2000	Pengadilan Negeri Surabaya	94,56%	95,85%	96,78%	94,09%	95.32%(953.00)
7	>2000	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	91,61%	94,27%	96,80%	94,04%	94.18%(941.26)
8	>2000	Pengadilan Negeri Bekasi	90,59%	96,39%	98,41%	90,56%	93.99%(944.31)
9	>2000	Pengadilan Negeri Tangerang	93,81%	92,95%	93,90%	91,16%	92.95%(926.88)
10	>2000	Pengadilan Negeri Semarang	93,33%	94,89%	86,63%	94,19%	92.26%(928.91)
11	>2000	Pengadilan Negeri Bandung	91,97%	94,42%	95,99%	86,28%	92.16%(919.22)
12	>2000	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	88,63%	96,24%	92,47%	90,67%	92.00%(915.52)
13	>2000	Pengadilan Negeri Medan	92,67%	92,43%	88,77%	90,66%	91.13%(914.29)
14	>2000	Pengadilan Negeri Makassar	94,96%	91,05%	85,93%	84,77%	89.18%(889.32)
15	>2000	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	87,33%	87,54%	75,66%	83,84%	83.59%(847.72)

II. Pengadilan Negeri Kelas IA perkara diatas 2000 dengan Persentase Implementasi SIPP Tertinggi

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	>2000	Pengadilan Negeri Pekanbaru	95,04%	97,57%	98,50%	97,57%	97.17%(964.76)
2	>2000	Pengadilan Negeri Malang	95,07%	98,09%	95,96%	96,75%	96.47%(965.82)
3	>2000	Pengadilan Negeri Mojokerto	96,67%	96,07%	97,24%	93,60%	95.90%(952.54)

III. Pengadilan Negeri Kelas IA perkara antara 1001 s/d 2000 dengan Persentase Implementasi SIPP Tertinggi

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	1001~2000	Pengadilan Negeri Ambon	95,23%	98,16%	99,95%	97,94%	97.82%(974.70)
2	1001~2000	Pengadilan Negeri Yogyakarta	95,95%	99,08%	97,41%	98,65%	97.77%(965.49)
3	1001~2000	Pengadilan Negeri Banjarmasin	96,58%	98,26%	99,13%	96,71%	97.67%(964.12)

IV. Pengadilan Negeri Kelas IA perkara 1 s/d 1000 dengan Persentase Implementasi SIPP Tertinggi

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	501~1000	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	96,30%	99,66%	99,78%	100,00%	98.94%(992.01)
2	1~500	Pengadilan Negeri Sragen	96,15%	99,79%	99,78%	99,06%	98.70%(975.47)
3	501~1000	Pengadilan Negeri Klaten	96,44%	99,86%	100,00%	97,62%	98.48%(973.92)

V. Pengadilan Negeri Kelas IB perkara 1001 s/d 2000 dengan Persentase Implementasi SIPP Tertinggi

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	1001~2000	Pengadilan Negeri Bojonegoro	96,30%	99,54%	100,00%	100,00%	98.96%(978.82)
2	1001~2000	Pengadilan Negeri Bangil	95,70%	99,47%	99,89%	100,00%	98.76%(976.52)
3	1001~2000	Pengadilan Negeri Tuban	96,30%	99,38%	98,83%	99,86%	98.59%(975.11)
4	1001~2000	Pengadilan Negeri Karawang	94,81%	98,68%	99,22%	99,25%	97.99%(976.02)
5	1001~2000	Pengadilan Negeri Stabat	95,55%	98,61%	97,65%	97,14%	97.24%(960.52)

VI. Pengadilan Negeri Kelas IB perkara 501 s/d 1000 dengan Persentase Implementasi SIPP Tertinggi

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	501~1000	Pengadilan Negeri Madiun	96,30%	100,00%	100,00%	100,00%	99.08%(976.00)
2	501~1000	Pengadilan Negeri Pematang	96,15%	99,90%	100,00%	99,54%	98.90%(972.42)
3	501~1000	Pengadilan Negeri Tarakan	97,22%	99,24%	99,92%	98,94%	98.83%(979.94)
4	501~1000	Pengadilan Negeri Subang	96,15%	99,70%	99,50%	99,92%	98.82%(962.70)
5	501~1000	Pengadilan Negeri Tabanan	95,29%	99,56%	100,00%	100,00%	98.71%(984.78)

VII. Pengadilan Negeri Kelas IB perkara 1 s/d 500 dengan Persentase Implementasi SIPP Tertinggi

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	1~500	Pengadilan Negeri Demak	98,15%	99,39%	100,00%	99,83%	99.34%(975.75)
2	1~500	Pengadilan Negeri Purbalingga	94,53%	100,00%	99,93%	99,66%	98.53%(959.65)

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
3	1~500	Pengadilan Negeri Kendal	100,00%	99,36%	98,66%	95,94%	98.49%(979.52)
4	1~500	Pengadilan Negeri Wates	96,30%	99,08%	99,87%	98,53%	98.44%(972.00)
5	1~500	Pengadilan Negeri Martapura	96,30%	100,00%	96,94%	99,96%	98.30%(975.64)

VIII. Pengadilan Negeri Kelas II perkara 501 s/d 1000 dengan Persentase Implementasi SIPP Tertinggi

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	501~1000	Pengadilan Negeri Airmadidi	95,50%	99,18%	98,73%	98,80%	98.05%(983.32)
2	501~1000	Pengadilan Negeri Rengat/indragiri	96,56%	98,48%	97,11%	99,54%	97.92%(968.04)
3	501~1000	Pengadilan Negeri Trenggalek	96,15%	99,61%	96,35%	99,57%	97.92%(950.94)
4	501~1000	Pengadilan Negeri Magetan	96,30%	99,94%	94,92%	100,00%	97.79%(956.93)
5	501~1000	Pengadilan Negeri Pangkajene	96,15%	99,08%	95,37%	100,00%	97.65%(941.84)

IX. Pengadilan Negeri Kelas II perkara 1 s/d 500 dengan Persentase Implementasi SIPP Tertinggi

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	1~500	Pengadilan Negeri Muara Bulian	100,00%	99,84%	100,00%	100,00%	99.96%(984.25)
2	1~500	Pengadilan Negeri Andoolo	100,00%	99,56%	98,98%	100,00%	99.64%(974.53)
3	1~500	Pengadilan Negeri Marabahan	100,00%	99,31%	98,71%	99,99%	99.50%(968.32)
4	1~500	Pengadilan Negeri Rote Ndao	96,15%	99,72%	100,00%	100,00%	98.97%(963.70)
5	1~500	Pengadilan Negeri Negara	97,04%	99,43%	99,76%	99,57%	98.95%(970.70)

X. Pengadilan Negeri dengan Persentase Implementasi SIPP dibawah 90%

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	1~500	Pengadilan Negeri Pariaman	85,16%	92,41%	93,73%	88,35%	89.91%(885.29)
2	1~500	Pengadilan Negeri Takengon	96,15%	100,00%	78,21%	85,17%	89.88%(896.74)
3	>2000	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	95,07%	93,53%	86,36%	84,18%	89.78%(900.76)
4	501~1000	Pengadilan Negeri Raba/bima	96,30%	92,26%	84,12%	85,79%	89.62%(888.60)
5	1~500	Pengadilan Negeri Manokwari	93,78%	91,38%	89,92%	82,10%	89.29%(860.77)
6	1~500	Pengadilan Negeri Putussibau	96,15%	97,27%	77,54%	85,35%	89.08%(883.54)
7	1001~2000	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	94,94%	94,44%	84,55%	81,14%	88.77%(895.37)
8	1~500	Pengadilan Negeri Kaimana	96,15%	94,29%	79,01%	85,11%	88.64%(844.67)
9	1001~2000	Pengadilan Negeri Jayapura	95,25%	81,14%	84,50%	92,99%	88.47%(851.61)
10	1~500	Pengadilan Negeri Saumlaki	96,15%	92,37%	87,50%	76,74%	88.19%(844.47)
11	1~500	Pengadilan Negeri Singkil	96,30%	99,64%	56,55%	98,75%	87.81%(884.80)
12	1~500	Pengadilan Negeri Calang	96,15%	98,08%	78,99%	78,01%	87.81%(846.25)
13	1~500	Pengadilan Negeri Bantaeng	81,48%	91,13%	92,15%	85,41%	87.54%(856.12)
14	1~500	Pengadilan Negeri Blangpidie	96,15%	98,24%	79,30%	76,45%	87.54%(857.45)
15	1~500	Pengadilan Negeri Tubei	96,15%	90,05%	73,90%	88,83%	87.23%(851.59)
16	1~500	Pengadilan Negeri Sintang	94,44%	94,62%	69,36%	89,02%	86.86%(886.29)
17	501~1000	Pengadilan Negeri Palu	95,21%	81,48%	83,43%	82,15%	85.57%(826.22)
18	1~500	Pengadilan Negeri Lasusua	96,30%	88,84%	66,67%	86,17%	84.50%(820.50)
19	1~500	Pengadilan Negeri Bobong	96,15%	85,16%	75,13%	80,85%	84.32%(789.43)
20	1~500	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	96,15%	88,30%	61,98%	88,69%	83.78%(806.91)
21	1~500	Pengadilan Negeri Sibuhuan	73,08%	99,03%	70,31%	92,56%	83.74%(852.16)
22	1~500	Pengadilan Negeri Natuna	96,30%	83,20%	76,96%	77,81%	83.57%(811.33)

#	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
23	501~1000	Pengadilan Negeri Singkawang	96,30%	57,11%	83,44%	94,70%	82.89%(742.18)
24	1~500	Pengadilan Negeri Tapaktuan	96,15%	85,62%	60,36%	77,56%	79.92%(775.74)
25	1001~2000	Pengadilan Negeri Padang	92,63%	76,90%	68,09%	80,49%	79.53%(782.55)
26	1~500	Pengadilan Negeri Sinabang	96,15%	43,38%	62,96%	56,38%	64.72%(532.50)